

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bagian tinjauan pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan pembanding terhadap isu yang diangkat. Tinjauan literatur diperlukan untuk menguraikan beragam perspektif, teori, dan hasil penelitian terdahulu dari berbagai referensi, guna membangun pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Penjabaran literatur tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

Literatur Pertama yaitu jurnal yang berjudul **“Protection of Child Victims of Trafficking in Vietnam”**, yang ditulis oleh Nguyen Quynh Trang pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan anak di Vietnam merupakan masalah serius yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan korban dan penegakan hukum. Data tentang korban perdagangan anak masih terbatas dan kurang sistematis, sehingga menyulitkan upaya identifikasi dan penanganan yang efektif. Perlindungan hukum di Vietnam belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional, khususnya terkait perlindungan anak usia 16-18 tahun yang masih kurang mendapat perhatian khusus. Meskipun pemerintah Vietnam telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan pusat bantuan dan kebijakan nasional, implementasi di lapangan masih kurang efektif akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta prosedur yang rumit (Trang, 2024).

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan multilapis yang meliputi perlindungan awal, keterlibatan sistem peradilan pidana, reintegrasi sosial jangka panjang, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan profesional. Rekomendasi utama meliputi revisi regulasi hukum agar lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga, penambahan sumber daya dan tenaga ahli, serta fokus pada pendekatan yang berpusat pada korban untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan (Trang, 2024).

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal fokus utama yaitu membahas isu *child trafficking* di Vietnam serta menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Keduanya juga menekankan bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya pemahaman hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya perdagangan anak. Meskipun begitu terdapat perbedaan dari kedua penelitian ini. Penelitian upaya Blue Dragon lebih menyoroti peran NGO yaitu Blue Dragon Children's Foundation sebagai aktor non-negara yang aktif dalam pencegahan, penyelamatan, dan rehabilitasi korban. Sementara itu, penelitian Ngunyen lebih berfokus pada peran pemerintah Vietnam, dengan meninjau kebijakan hukum dan regulasi nasional serta upaya legal dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak.

Literatur kedua merupakan jurnal yang berjudul “**International Cooperation in Prevention and Combating *Human trafficking* in Southeast Asian Region: A Case Study of Vietnam**” yang ditulis oleh Tran Quang Huyen pada 2020. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Vietnam telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas *human trafficking*, terutama setelah meratifikasi ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) pada tahun 2016. Vietnam juga aktif dalam kerjasama regional dan internasional melalui berbagai perjanjian dan *project* untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi korban, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Namun, perdagangan manusia tetap menjadi tantangan yang kompleks, terutama karena posisi geografis Vietnam yang berbatasan dengan China, Kamboja, dan Laos, serta perkembangan modus kejahatan yang terus berubah (Huyen, 2020).

Terdapat persamaan antara penelitian Blue Dragon yang penulis susun dengan penelitian yang ditulis oleh Huyen, yaitu keduanya sama-sama membahas masalah perdagangan orang di Vietnam dan bagaimana pentingnya perlindungan terhadap korban. Namun, terdapat perbedaan fokus dan pendekatan antara kedua penelitian ini, penelitian yang penulis susun memfokuskan pada peran aktor non-negara (NGO) dalam perlindungan korban secara langsung, sedangkan artikel jurnal lebih berfokus

pada bagaimana peran negara melalui kerjasama internasional seperti ACTIP dan kerjasama bilateral lainnya.

Literatur ketiga adalah penelitian dengan judul “**Transnational Crime and its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam**” yang ditulis oleh Hai Thanh Luong pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan transnasional di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam dan negara tetangga seperti Kamboja, Thailand, dan Malaysia, meliputi perdagangan manusia, *drug trafficking*, perdagangan satwa liar dan penebangan liar, serta kejahatan siber yang terus meningkat. Faktor-faktor seperti perbatasan yang mudah ditembus, lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya kerja sama regional memperparah masalah ini. Meskipun ada upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut, tantangan besar tetap ada karena jaringan kriminal yang kompleks dan penggunaan teknologi canggih oleh pelaku. Oleh karena itu, penelitian menekankan perlunya peningkatan kerja sama internasional, penguatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan strategi nasional yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan transnasional ini secara efektif (H. T. Luong, 2020).

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam mengangkat isu kejahatan lintas negara di Vietnam, khususnya perdagangan manusia sebagai bagian dari isu global dan tantangan keamanan sosial. Keduanya juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan pentingnya kerjasama antar aktor untuk menangani kejahatan transnasional. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan, penelitian yang penulis tulis hanya berfokus pada pembahasan *human trafficking* atau *child trafficking* dan lebih menekankan pada bagaimana peran NGO sebagai aktor utama dalam penanganan korban *child trafficking* secara langsung, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Luong membahas secara detail dan luas mengenai berbagai jenis kejahatan lintas negara, tidak hanya *human trafficking*, tetapi *drug trafficking*, kejahatan lingkungan, dan siber dengan fokus pada tren, tantangan, dan respons negara secara umum terhadap kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara.

Literatur keempat adalah jurnal yang berjudul “**Upaya UNICEF dalam Menangani *Child trafficking* di Vietnam Tahun 2017-2020**” yang ditulis oleh Dhimas Dwi Okta dan Shannaz Mutiara Deniar pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *child trafficking* di Vietnam masih menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan, dengan faktor utama penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya perlindungan hak asasi anak. Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mencegah perdagangan anak, seperti Law No.66/2011/QH12, serta membentuk tim khusus dan meningkatkan kapasitas peradilan anak. UNICEF berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembuatan kebijakan, peningkatan sistem perlindungan anak, advokasi, dan pelaksanaan program seperti The Child Protection Programme (2017-2021). Selain itu, upaya bersama antara pemerintah dan UNICEF terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh di Vietnam (Okta & Deniar, 2022).

Terdapat persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Dhimas dan Shannaz dengan penelitian yang penulis tulis, yaitu keduanya membahas topik yang diangkat yaitu isu *child trafficking* di Vietnam dan menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Kedua penelitian ini juga menekankan perlunya kerjasama antar aktor negara dan non-negara dalam menangani masalah ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua penelitian ini yaitu terdapat di aktor yang menangani isu *child trafficking* di Vietnam ini, pada penelitian penulis aktor yang diteliti adalah NGO Blue Dragon Children’s Foundation, dan teori yang dipakai adalah *global governance*, *English school* dan *role theory*, sedangkan penelitian Dhimmaz dan Shanaz meneliti aktor IGO yaitu UNICEF dan konsep yang digunakan adalah *human security*.

Literatur kelima adalah penelitian yang berjudul “**Assessing the Hotline Services on *Child trafficking* Victims: An Analysis of Vietnam**” yang ditulis oleh Oanh Van Nguyen dan Hai Thanh Luong pada 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *hotline* 111 di Vietnam berperan penting dalam mengidentifikasi

dan menyelamatkan korban perdagangan anak dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan bekerja sama dengan polisi, layanan sosial, dan LSM. Namun, efektivitas hotline ini masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya manusia, kerangka hukum, dan koordinasi antar lembaga, serta terdampak oleh pandemi COVID-19. Penelitian menekankan perlunya peningkatan kapasitas, kolaborasi multi-sektor, dan adopsi model yang lebih efektif untuk memperkuat upaya perlindungan korban secara berpusat pada kebutuhan mereka (O. Van Nguyen & Luong, 2023).

Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana para mitra LSM terhadap hotline di Vietnam dalam menangani korban *trafficking*. Nguyen dan Luong menjelaskan bahwa Blue Dragon merupakan NGO yang menjadi prioritas utama bagi operator *hotline* 111 dalam melakukan komunikasi untuk menyelamatkan korban perdagangan anak. Blue Dragon dianggap sangat efektif dan cepat dalam menangani misi penyelamatan, bahkan terkadang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga nasional. Operator hotline sering langsung menghubungi Blue Dragon untuk melakukan penyelamatan karena NGO ini memiliki antusiasme dan tanggung jawab yang tinggi dalam menangani kasus tersebut (O. Van Nguyen & Luong, 2023).

Hal tersebut menunjukkan persamaan antara kedua penelitian ini yang sama-sama membahas tentang isu yang sama yaitu perdagangan anak di Vietnam. Keduanya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam memberikan layanan perlindungan anak korban perdagangan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus utama dan pendekatannya. Penelitian yang penulis buat lebih memfokuskan pada bagaimana peran Blue Dragon dalam penyelamatan dan rehabilitasi korban secara langsung, sedangkan penelitian Nguyen dan Luong ini fokusnya hanya pada bagaimana LSM yang ada di Vietnam menangani korban melalui layanan *hotline* nasional 111 sebagai sarana pelaporan, penanganan awal, dan penghubung antara korban dengan lembaga terkait.

Literatur keenam adalah penelitian dari Mạc Thị Hoài Thương yang ditulis pada tahun 2025 dengan judul “***Human trafficking Prevention and Combat Under Regulations of International Law and Practice in Vietnam***”. Hasil dari penelitian

ini adalah penelitian ini membahas upaya Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia dengan mengacu pada hukum internasional seperti Protokol Palermo dan standar PBB. Pemerintah Vietnam juga aktif bekerjasama dengan negara tetangga dan organisasi internasional, serta melaksanakan kampanye edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu upaya penting adalah pelaksanaan “National Plan of Action (NPA) 2021-2025 with vision towards 2030”, yang melibatkan partisipasi semua kementerian dan daerah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran publik. Program ini didukung oleh berbagai NGO atau LSM setempat sebagai mitra pemerintah dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, Vietnam menyediakan bantuan hukum, sosial, dan program reintegrasi bagi korban. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti perbedaan definisi hukum, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan dalam pelaksanaan hukum, terutama dalam mengidentifikasi korban dan menangani perdagangan manusia yang semakin kompleks, termasuk melalui media sosial (Thuong, 2025).

Penelitian penulis dengan dan jurnal ini memiliki persamaan dalam membahas isu *human trafficking* di Vietnam, terutama yang berkaitan dengan anak. Keduanya juga membahas mengenai peran pemerintah Vietnam melalui program NPA yang sejalan dengan program LSM setempat sebagai mitra pemerintah dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban serta perlunya kerjasama antara LSM dengan pemerintah dalam menangani isu ini. Tetapi tentu terdapat perbedaan dalam pendekatannya. Penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana peran langsung NGO sebagai aktor utama dalam menyelamatkan dan merehabilitasi korban *child trafficking*, sementara jurnal ini lebih memfokuskan pada aspek hukum dan kebijakan negara Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia sesuai standar hukum internasional. Jadi, penelitian penulis menyoroti aksi nyata dari NGO sebagai mitra pemerintah Vietnam, sedangkan jurnal ini menekankan penyesuaian hukum nasional terhadap konvensi internasional.

Literatur ketujuh berjudul **“Rethinking Border Management: A Human Security Approach to Combating *Human trafficking* in the Mekong Subregion”** yang ditulis oleh Firstyarinda Indraswari pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan perbatasan di subregion Mekong masih didominasi oleh pendekatan yang berfokus pada kepentingan politik dan ekonomi negara, sehingga aspek keamanan manusia seperti perlindungan terhadap perdagangan manusia, keamanan pribadi, lingkungan, dan komunitas kurang mendapat perhatian. Dari analisis 40 regulasi di enam negara Mekong, hanya sekitar 23% yang secara eksplisit menargetkan perdagangan manusia, mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kedaulatan negara daripada solusi yang berpusat pada manusia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori keamanan manusia generasi pertama dan kedua (*first- and second-generation human security*) dari UNDP untuk menilai efektivitas regulasi tersebut (Indraswari, 2024).

Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada pembahasan mengenai perdagangan manusia di wilayah Vietnam. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada konsep yang digunakan, penelitian penulis menggunakan konsep *Global Governance* sedangkan jurnal yang dibuat oleh Indraswari menggunakan konsep *Human Security*. Tak hanya itu terdapat perbedaan pada wilayah penelitian, jurnal ini meneliti wilayah di subregion Mekong yaitu Vietnam, Kamboja, China, Laos, Myanmar, dan Thailand, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada negara Vietnam saja.

Literatur kedelapan berjudul **“Understanding Indonesia's Role in The ‘ASEAN Outlook On The Indo-Pacific’: A Role Theory Approach”** yang ditulis oleh I Gusti Bagus Dharma Agastia pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif memosisikan sebagai *middle power* dan pemimpin regional di kawasan Indo-Pasifik dengan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan regional dan global melalui pendekatan inklusif dan damai, seperti tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Dalam menjelaskan posisi ini, penelitian menggunakan *role theory* untuk menganalisis

proses *role conception* dan *role location* Indonesia sebagai kekuatan menengah yang aktif dalam dinamika regional. *Role theory* membantu memahami bagaimana Indonesia mengelola ekspektasi internal dan eksternal dalam membentuk narasi dan kebijakan luar negerinya. Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana Indonesia menavigasi kompleksitas geopolitik kawasan dengan menekankan netralitas, identitas maritim, dan strategi multilateralnya, seperti dalam Global Maritime Fulcrum dan PACINDO. Secara keseluruhan, peran aktif Indonesia mendapat respons positif dari aktor-aktor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, yang menguatkan posisinya sebagai aktor kunci dalam mendorong stabilitas dan kerja sama kawasan (Agastia, 2020).

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan *role theory* dalam penelitiannya. Akan tetapi perbedaan antara jurnal ini dan penelitian yang penulis buat adalah pada ruang lingkup penelitian, penelitian yang ditulis oleh penulis menyoroti perdagangan manusia khususnya anak di Vietnam. Sedangkan jurnal ini membahas bagaimana peran negara Indonesia memposisikan dan mengartikulasikan perannya sebagai kekuatan menengah dan proses *role location* Indonesia dalam struktur baru Indo-Pasifik dan bagaimana Indonesia menggunakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk memperkuat peran tersebut.

Literatur kesembilan adalah jurnal yang berjudul **“The Global Governance Problem with Framing *Human trafficking* as ‘Modern Slavery’: The Experiences of International Actors in *Human trafficking* Policymaking”** yang ditulis oleh Rose Broad dan Nick Turnbull pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menemukan bahwa upaya konsep *global governance* dalam menangani perbudakan modern dan perdagangan manusia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menerjemahkan kebijakan dari negara seperti Inggris ke konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda di negara lain. Meskipun Inggris berupaya memimpin dalam membingkai ulang masalah ini sebagai "perbudakan modern" dan membangun komunitas epistemik global untuk menciptakan koherensi kebijakan, warisan kolonial

dan variasi lokal dalam praktik eksploitasi menjadi hambatan signifikan. Konsep *global governance* dalam penelitian ini dipahami sebagai proses kolaborasi lintas negara dan aktor internasional yang tidak memiliki struktur hierarkis formal, sehingga bergantung pada jaringan informal, komunitas ahli, dan kemitraan untuk berbagi pengetahuan dan merumuskan kebijakan bersama. Pendekatan ini menyoroti pentingnya kerja sama transnasional dan peran elit kebijakan dalam membentuk agenda global, meskipun terdapat ketidakpastian dan perbedaan konteks lokal yang kompleks (Broad & Turnbull, 2024).

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan konsep *global governance* dalam penelitiannya dan dengan pembahasan yang serupa mengenai *human trafficking* sebagai isu global. Akan tetapi perbedaan antara jurnal ini dan penelitian yang penulis buat adalah pada ruang lingkup penelitian, penelitian yang ditulis oleh penulis menyoroti perdagangan manusia khususnya anak di Vietnam. Sedangkan jurnal ini menyoroti perdagangan manusia dalam konteks global dengan fokus pada bagaimana kebijakan *anti-trafficking* manusia dan perbudakan modern diterapkan dan dipengaruhi oleh warisan kolonial serta perbedaan konteks sosial dan budaya di berbagai negara, termasuk peran Inggris sebagai negara yang memimpin dalam pembungkaman masalah ini secara internasional.

Literatur terakhir berjudul “**Between Sovereignty and Universal Norms: An English school Analysis of Global Responses to Russia’s Anti-LGBT Policies**” yang ditulis oleh Cepi Novia Tristantri & Hafid Adim Pradana pada tahun 2024. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respons global terhadap kebijakan anti-LGBT Rusia dapat dipahami melalui dua pendekatan dalam *English school*. Pertama, pendekatan pluralisme menjelaskan bahwa negara-negara yang tidak mengecah kebijakan Rusia melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan Rusia untuk menjaga tatanan internasional. Kedua, pendekatan solidarisme menjelaskan bahwa oposisi dari negara-negara pro-LGBT dan organisasi internasional terhadap kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menegakkan nilai-nilai universal demi menciptakan tatanan internasional yang berkeadilan (Tristantri & Pradana, 2024).

Jurnal ini menggunakan teori *English school* dalam penelitiannya. Hal tersebut yang menjadi persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Cepi dan Hafid dengan penelitian yang sedang penulis buat. Keduanya membahas mengenai NGO yang merespons persoalan yang terjadi dalam suatu negara. Tentu keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu pada isu yang diangkat yaitu pembahasan mengenai isu *child trafficking* di Vietnam dan isu Anti-LGBT policy (pelanggaran HAM terhadap orientasi seksual). Di Rusia, dan juga aktor yang dibahas. Jika penelitian penulis mengacu pada Blue Dragon, jurnal literatur ini mengacu pada beragam aktor.

Mayoritas literatur studi terdahulu, menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menangani *child trafficking*. Misalnya, Trang menyoroti bahwa pemerintah Vietnam telah membentuk pusat bantuan, membuat kebijakan nasional, dan meningkatkan koordinasi antarlembaga (Trang, 2024). Namun, penelitian tersebut mendapat tantangan dari studi-studi yang menyoroti peran utama aktor *non-state*, khususnya NGO. Misalnya penelitian Nguyen & Luong mengungkap Blue Dragon menjadi mitra utama hotline 111 karena dinilai lebih cepat dan efektif dalam menangani korban *child trafficking* dibanding lembaga pemerintah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan kerjasama UNICEF dengan pemerintah Vietnam lebih efektif bila dilakukan melalui pendekatan komunitas dan kemitraan lokal (Okta & Deniar, 2022).

Dari dua pendekatan diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan *child trafficking* tidak hanya bergantung pada aktor *state* saja. Penelitian ini mengambil posisi sintesis, yaitu menempatkan Blue Dragon sebagai aktor *non-state* yang berperan langsung. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara dan NGO menjadi elemen penting dalam penanganan *child trafficking* secara efektif di Vietnam. Penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur dengan menyoroti aksi nyata dari NGO dalam konteks penanganan langsung, yang selama ini masih minim dibahas dibandingkan dengan peran negara. Selain itu, peneliti menawarkan kebaruan dengan menggunakan pendekatan *Global Governance*, *English School* dan *Role Theory* karena penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang pernah membahas isu ini dengan pendekatan-pendekatan tersebut.